

# FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLAMBATAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KOTA PAREPARE

*Factors Affecting The Delay In Reporting The Accountability Of The City Of Parepare*

Widya Ulandari<sup>1</sup>, Syarifuddin Yusuf<sup>2</sup>

Email : [widyaularipri@gmail.com](mailto:widyaularipri@gmail.com)<sup>1</sup>, [yusufsyaarif64@gmail.com](mailto:yusufsyaarif64@gmail.com)<sup>2</sup>

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare  
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan  
Kode Pos 91131

## Abstract

*This study aims to determine the factors that influence the delay in reporting the accountability of the City of Parepare. The method used in this study is quantitative. The sampling technique in this study was total sampling. Total sampling is a sampling technique where the number of samples is equal to the population of 46 populations. The results showed that only one variable, namely the capacity of Human Resources (HR), affected the delay in reporting accountability. Variable use of information technology and the Internal Control System (SPI) have no effect on delays in reporting accountability. Timeliness indicates that financial statements must be presented within a predetermined period of time to show the extent of the implementation of the SKPD APBD. The delay in the accountability of one of the agencies will hamper the process of preparing the financial statements of the City of Parepare.*

**Keywords : Human Resources, Information Technology and Internal Control Systems (SPI)**

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban Kota Parepare. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampelnya sama dengan populasi yaitu sebanyak 46 populasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya satu variabel yaitu kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpengaruh terhadap keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban. Variabel penggunaan teknologi informasi dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) tidak berpengaruh terhadap keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban. Ketepatan waktu menunjukkan bahwa laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu yang telah ditentukan untuk menunjukkan sejauh mana pelaksanaan APBD SKPD. Keterlambatan pertanggungjawaban salah satu instansi akan membuat proses penyusunan laporan keuangan Kota Parepare menjadi terhambat.

**Kata Kunci : Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern (SPI)**

## PENDAHULUAN

Tidak tepat waktu atau keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban APBD SKPD menandakan tidak disiplinnya SKPD suatu daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang merujuk pada bendahara pengeluaran yakni yang menyusun serta melaporkan pertanggungjawaban atas dana yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBD. Ketepatan waktu menunjukkan bahwa laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu yang telah ditentukan untuk menunjukkan sejauh mana pelaksanaan APBD SKPD. Menurut kebijakan akuntansi Kota Parepare Monitoring Pertanggungjawaban APBD SKPD dilakukan untuk tercapainya penyelesaian Pertanggungjawaban SKPD tepat waktu, baik perbulan, triwulan dan semesteran untuk diteliti sejauh mana SKPD membuat Pertanggungjawaban yang baik dan

benar sehingga Perda Pertanggungjawaban APBD Kota Parepare penetapannya tepat waktu sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Ketepatanwaktuan berkaitan dengan teori kepatuhan. Kepatuhan akan pelaporan keuangan tahunan perusahaan publik diatur dalam Permendagri No 55 Tahun 2008 Bendahara pengeluaran membuat dan melaporkan pertanggungjawaban fungsional yaitu tanggal 10 bulan berikutnya, SPJ triwulan yaitu tanggal 5 bulan berikutnya, sedangkan pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat 5 hari kerja sebelum hari kerja terakhir bulan tersebut.

Ketepatanwaktuan berkaitan dengan teori kepatuhan. Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturandan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh padaajaran atau peraturan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban adalah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), penggunaan teknologi dan Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi/kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Menurut Primayana (2014) bahwa kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan yang meliputi tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai dari manusia untuk menyelesaikan tugas ataupun tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2009).

Penggunaan teknologi atau suatu sistem informasi dapat menghasilkan informasi yang efektif dan efisien. Penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan keuangan daerah telah diakomodir dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja. Menurut Sutarman (2009: 14) komponen teknologi informasi adalah hardware (perangkat keras), software (perangkat lunak), database (basis data), network (fasilitas jaringan dan komunikasi) dan people.

Menurut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern (SIP) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengendalikan proses akuntansi pemerintah daerah dan dapat disimpulkan dengan adanya pengendalian yang dapat mengawasi dan mengendalikan proses akuntansi pemerintah daerah dapat meningkatkan ketepatanwaktuan pelaporan pertanggungjawaban SKPD.

Cara pimpinan instansi pemerintah mengetahui kinerja dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern melalui evaluasi terpisah atas Sistem pengendalian Internnya. Pemantauan juga berguna untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko utama seperti penggelapan, pemborosan, penyalahgunaan, dan salah-kelola (mismanagement).

#### 1. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, SPIP terdiri dari lima unsur yaitu :

##### a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap pimpinan instansi atau lembaga tentang pengendalian intern yang dapat menimbulkan kesadaran seluruh pegawai mengenai pentingnya pengendalian bagi instansi atau lembaga yang bersangkutan. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif.

##### b. Penilaian Resiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Unsur ini memberikan penekanan bahwa pengendalian intern harus memberikan penilaian

atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Dalam rangka penilaian risiko pimpinan Instansi Pemerintah perlu menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tujuan Instansi Pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Tujuan Instansi Pemerintah tersebut wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, sehingga untuk mencapainya pimpinan Instansi Pemerintah perlu menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen yang terintegrasi dengan rencana penilaian risiko.

- c. Kegiatan Pengendalian  
Pimpinan Instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dari sifat dan tugas dan fungsi yang bersangkutan.
- d. Informasi dan Komunikasi  
Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif.
- e. Pemantauan Pengendalian Intern  
Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Penyampaian laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, keterlambatan laporan pertanggungjawaban dapat dikenakan sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D atas Surat Perintah Membayar dan Ganti Uang Persediaan atau Surat Perintah Membayar atau Tambah Uang persediaan (SPM-GUP/SPM-TUP) yang dianjurkan dari rekening bendahara dan sanksi tidak membebaskan bendahara dari kewajiban menyampaikan LPJ dan RK.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian bersifat kuantitatif. Penelitian dilakukan di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan. Populasi dalam penelitian ini adalah 46 populasi dari seluruh SKPD berjumlah 33 yang berada di lingkup Kota Parepare Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah seluruh bendahara SKPD baik itu bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan sebanyak 46 bendahara.

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas yakni kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), penggunaan teknologi serta Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan variabel terikat yakni keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas.

Adapun Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, penelitian pustaka dan kuisioner. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Sedangkan sumber data pada penelitian ini adalah person (orang) yaitu sumber data berupa orang yang bisa memberikan data berupa jawaban tertulis melalui angket. Dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan SKPD, place (tempat) yaitu sumber data berupa tempat dilakukannya penelitian yang dimaksud dan paper (dokumen) yaitu sumber yang berupa dokumen atau catatan-catatan yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah terkait dengan permasalahan peneliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam menjawab hipotesis yang diungkapkan dalam mencapai tujuan penelitian ini adalah model regresi linear berganda (*multiple regression analysis*). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Pengelolaan data akan dilakukan dengan menggunakan alat bantu aplikasi software *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

**Tabel 1. Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.448 <sup>a</sup>	.201	.144	1.99596	1.796

a. Predictors: (Constant), SPI (X3), Penggunaan TI (X2), Kapasitas SDM(X1)

b. Dependent Variable: Keterlambatan Pelaporan LPJ (Y)

Berdasarkan output di atas, diketahui nilai *R Square* sebesar 0,201, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 (Kapasitas Sumber Daya Manusia), X2 (Penggunaan Teknologi Informasi), dan X3 (Sistem Pengendalian Intern) secara simultan terhadap variabel Y (Keterlambatan Pelaporan Laporan Pertanggung Jawaban) adalah sebesar 20,1%.

**Tabel 2. Koefisien**

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.		
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	5.034	4.350	1.157	.254	
	Kapasitas SDM (X1)	.270	.090	.444	3.014	.004
	Penggunaan TI (X2)	.043	.076	.080	.563	.576
	SPI (X3)	-.175	.174	-.145	-1.005	.321

Dependent Variable: Keterlambatan Pelaporan LPJ (Y)

- Pengujian Hipotesis Pertama (H1)  
Diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar  $0,004 < 0,05$  dan nilai t hitung  $3,014 > t$  tabel 2,018, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) (X1) terhadap Keterlambatan Pelaporan Pertanggungjawaban (Y).
- Pengujian Hipotesis Kedua (H2)  
Diketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar  $0,576 > 0,05$  dan nilai t hitung  $0,563 < t$  tabel 2,018, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi (X2) terhadap Keterlambatan Pelaporan Pertanggungjawaban (Y).
- Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)  
Diketahui nilai sig untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar  $0,321 > 0,05$  dan nilai t hitung  $-1,005 < t$  tabel 2,018, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh Sistem Pengendalian Intern (X3) terhadap Keterlambatan Pelaporan Pertanggungjawaban (Y).

Tabel 3. Uji Anova

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	42.005	3	14.002	3.515	.023 <sup>b</sup>
	Residual	167.321	42	3.984		
	Total	209.326	45			

a. Dependent Variable: Keterlambatan Pelaporan LPJ (Y)

b. Predictors: (Constant), SPI (X3), Penggunaan TI (X2), Kapasitas SDM (X1)

Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,023 < 0,05 dan nilai F hitung 3,515 > 2,82, sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima yang berarti terdapat pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1), Penggunaan Teknologi Informasi (X2), dan Sistem Pengendalian Intern (X3) secara simultan terhadap Keterlambatan Pelaporan Laporan Pertanggung Jawaban (Y).

## Pembahasan

### 1. Pengaruh kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap keterlambatan pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban. Hal ini menandakan Sumber Daya Manusia (SDM) pada instansi pemerintah kurang kompeten untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya (SPJ Fungsional) dengan tepat waktu.

Faktor latar belakang pendidikan yang dimana dianggap penting bagi seorang yang menduduki jabatan bendahara dianggap tidak mampu mempengaruhi pekerjaan menjadi cepat. Walaupun terdapat bendahara dengan tingkat pendidikan formal yang dapat dikatakan tinggi, tidak mutlak akan membantu pekerjaannya. Hal ini dikarenakan saat menjalani pendidikan, terdapat perbedaan yang signifikan antara teori yang didapatkan di perguruan tinggi dengan realita yang dikerjakan saat ini.

Adapun tambahan dengan diikutinya pendidikan nonformal dan informal seorang bendahara juga tidak mampu mengimbangi pekerjaannya menjadi cepat. Hal tersebut dapat terjadi jika pendidikan yang diikuti tidak berhubungan langsung dengan tanggungjawab sebagai bendahara juga tidak mampu untuk bendahara melaporkan pertanggungjawabannya (SPJ Fungsional) dengan tepat waktu.

Sub variabel kedua yakni pelatihan. Kurangnya pelatihan ataupun bimbingan teknis yang diberikan kepada bendahara membuat seorang bendahara tidak dapat melaporkan pertanggungjawabannya (SPJ Fungsional) dengan tepat waktu. Walaupun ternyata bendahara telah diberikan pelatihan, tetapi pelatihan dengan materi yang tidak mengarah kepada tanggungjawab seorang bendahara juga tidak dapat memberikan dampak untuk bendahara dalam melaporkan pertanggungjawabannya (SPJ Fungsional) dengan tepat waktu.

Sub variabel terakhir adalah pengalaman. Berdasarkan karakteristik responden pada masa kerja, terdapat bendahara yang diatas masa kerja 5 tahun yang dapat dikategorikan memiliki pengalaman yang cukup lama juga tidak mampu membuat laporan pertanggungjawabannya (SPJ Fungsional) disampaikan dengan tepat waktu. Hal ini dapat dikatakan walupun seorang bendahara dengan masa kerja yang sudah lama dan dengan pekerjaannya yang berkaitan dengan perbendaharaan juga tidak mampu membuktikan seorang bendahara dapat menyampaikan laporan pertanggungjawabannya (SPJ Fungsional) dengan tepat waktu, jika kurangnya kesadaran dari bendahara tersebut.

Kurangnya kesadaran atas tanggungjawab yang dimilikinya menjadi faktor utama yang akan berdampak pada latar belakang pendidikan, pelatihan dan pengalaman seorang bendahara dalam melaporkan pertanggungjawabannya (SPJ Fungsional) dengan tepat waktu. Demikian halnya jika latar belakang pendidikan seorang bendahara yang dikategorikan tinggi, seringnya mengikuti pelatihan dan memiliki masa kerja yang cukup

lama, jika kurangnya kesadaran dari bendahara tersebut atas tanggungjawab yang dimilikinya juga akan sia-sia pada pekerjaannya saat ini. Maka dari itu hipotesis yang diajukan oleh penulis dapat diterima yang berarti kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban (SPJ Fungsional)

## 2. Pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap keterlambatan pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional.

Penggunaan teknologi informasi di era sekarang sangat membantu pekerjaan, tidak heran jika perkembangannya sangat cepat. Dikarenakan adanya teknologi yang dapat membantu pekerjaan maka dari itu pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antara unit kerja.

Dengan adanya perangkat keras seperti komputer dan printer sangat membantu bendahara untuk melaporkan pertanggungjawabannya (SPJ Fungsional) dengan tepat waktu. Proses pencatatan untuk transaksi tidak lagi dilakukan dengan cara manual melainkan dengan komputerisasi. Seorang bendahara juga harus mampu menjalankan komputer dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan pada jawaban kuesioner bendahara yang menyetujui pernyataan diatas.

Faktor pendukung lainnya agar laporan pertanggungjawaban (SPJ Fungsional) disampaikan tepat waktu yakni adanya software dan database yang terintegrasi. Dimana dalam pemerintahan digunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang berperan sebagai software sekaligus database. Sistem tersebut mampu menyimpan seluruh unsur yang menjadi syarat pada laporan pertanggungjawaban (SPJ Fungsional). Dengan adanya software tersebut pelaporan pertanggungjawaban (SPJ Fungsional) dapat disampaikan dengan tepat waktu. Hal ini dapat dibuktikan pada jawaban kuesioner bendahara yang menyetujui pernyataan diatas.

Database ini sangat berguna dikarenakan seluruh data SKPD berupa SPJ Fungsional, neraca, laporan realisasi anggaran dan sebagainya dapat tersimpan pada sistem ini. Jadi jika sewaktu-waktu pengguna informasi memerlukan informasi tersebut, tidak perlu lagi berhubungan dengan bendahara untuk meminta informasi yang dibutuhkan cukup dengan menggunakan sistem ini informasi yang dicari akan ditampilkan. Database yang terintegrasi tersebut membantu bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawabannya (SPJ Fungsional) dengan tepat waktu. Hal ini dapat dibuktikan pada jawaban kuesioner bendahara yang menyetujui pernyataan diatas.

Penggunaan teknologi informasi tidak ideal tanpa adanya akses network (jaringan) yang mendukung. Kecepatan jaringan sangat membantu proses penyampaian laporan pertanggungjawaban (SPJ Fungsional) menjadi cepat, dikarenakan proses seperti penjumlahan dilakukan dengan komputerisasi. Maka dari itu agar penginputan menjadi cepat dibutuhkannya jaringan yang memiliki kecepatan yang baik. Tidak hanya itu untuk membuka SIPKD yang dimana telah dijelaskan sebelumnya, juga membutuhkan kecepatan jaringan yang optimal, sehingga bendahara dapat mencetak laporannya dan melaporkan pertanggungjawaban (SPJ Fungsional) atas dana yang dikelolanya dengan tepat waktu. Hal tersebut juga dapat dibuktikan pada jawaban kuesioner bendahara yang menyetujui pernyataan diatas.

Sub variabel pada penggunaan teknologi informasi yang dijelaskan sangat membantu pekerjaan menjadi cepat, hal ini dibuktikan dengan kuesioner. Dimana hasil kuesioner menunjukkan tidak adanya pengaruh penggunaan teknologi informasi yang menyebabkan keterlambatan laporan pertanggungjawaban (SPJ Fungsional), dengan ini teknologi informasi bukan menjadi penyebab laporan pertanggungjawaban (SPJ Fungsional) lambat disampaikan.

## 3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap keterlambatan pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional.

Unsur pada Sistem Pengendalian Inter (SIP) yakni lingkungan pengendalian tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban (SPJ Fungsional). Pemberian tindakan tegas berupa teguran dan adanya pengawasan dari pimpinan maupun lembaga pengawas kepada bendahara kiranya dapat membuat seorang

bendahahara menjadi jera untuk tidak memperlambat pelaporan pertanggungjawabannya (SPJ Fungsional). Tapi hal tersebut tidak sejalan dengan apa yang terjadi, dikarenakan masih ada saja SKPD yang pelaporannya melebihi waktu yang telah ditetapkan.

Teguran yang diberikan kepada SKPD yang terlambat dalam pelaporan pertanggungjawabannya (SPJ Fungsional) tercermin pada coffee morning yang dilakukan setiap senin pagi oleh Kepala Daerah yang dihadiri para pejabat. Kepala Daerah mengingatkan kepada SKPD yang pelaporannya belum disampaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan untuk segera melaporkannya. Walaupun telah diberikan teguran, tapi nyatanya teguran tersebut tidak dipedulikan oleh SKPD.

Jika pelaporan pertanggungjawaban (SPJ Fungsional) tidak disampaikan tepat waktu, maka Kepala Daerah dapat memberikan sanksi yang tegas kepada bendahara sebagai tindak kedisiplinan terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi sanksi tersebut juga tidak mempengaruhi bendahara untuk menyampaikan laporannya dengan tepat waktu, dikarenakan masih terdapat laporan SKPD yang tidak disampaikan tepat waktu.

Selain itu, pemberian tanggung jawab sebagai bendahara kepada seseorang yang memiliki kemampuan di bidang perbendaharaan diharapkan membuat pelaporan pertanggungjawaban (SPJ Fungsional) tersebut dilaporkan dengan tepat waktu. Tapi hal tersebut tidak sejalan dengan harapan. Hal ini dapat dibuktikan pada jawaban kuesioner yang menunjukkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh terhadap keterlambatan pelaporan.

Hipotesis yang diajukan penulis menunjukkan adanya pengaruh Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban (SPJ Fungsional). Hal ini menandakan kurangnya perhatian aparat pengawas dan Kepala Daerah atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku, dimana batas disampainya laporan pertanggungjawaban yaitu tanggal 10 bulan berikutnya. Hal ini tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan dimana masih terdapat SKPD yang tidak melaporkan pertanggungjawabannya (SPJ Fungsional) sesuai dengan tanggal yang dimaksud. Maka dari itu hipotesis yang diajukan oleh penulis dapat diterima yang berarti Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh terhadap keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban (SPJ Fungsional).

#### **4. Pengaruh kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), penggunaan teknologi informasi dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban**

Terdapat pengaruh kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) (X1), penggunaan teknologi informasi (X2), dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) (X3) secara simultan terhadap Keterlambatan Pelaporan Laporan Pertanggungjawaban (Y). Walaupun secara parsial hanya variabel kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpengaruh terhadap keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban.

Maka dari itu hipotesis yang diajukan oleh penulis dapat diterima yang berarti ketiga variabel tersebut menunjukkan bahwa bahwa terdapat pengaruh secara simultan terhadap keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan bahwa variabel kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh secara signifikan terhadap keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban. Sedangkan untuk variabel penggunaan teknologi informasi dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) tidak berpengaruh terhadap keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban. Walaupun demikian secara simultan ketiga variabel bebasnya yakni kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), penggunaan teknologi dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh terhadap keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban

**DAFTAR PUSTAKA**

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Griffin, 2004. *Komitmen Organisasi, Terjemahan*, Jakarta: Erlangga

Sutarman. 2009. *Pengantar Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Bumi Aksara.

Primayana, Atmadja, dan Darmawan. 2014. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan pemerintah Daerah. ( Studi Empiris Pada Pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo)*. Jurnal Akuntansi Progam S1. Vol:2 No:1 Tahun 2014

Waisno. 2009. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi*. Tesis Universitas Sumatera Utara Medan